

Problematika Manajemen Keuangan Destinasi Wisata Pulau Kumala Kabupaten Kutai Kartanegara

Noval Hardiyanto¹ Heryono Susilo Utomo² Jumansyah³

Abstrak

Penelitian ini membahas problematika manajemen keuangan destinasi wisata pulau kumala, yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan manajemen keuangan destinasi wisata Pulau Kumala di Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan Destinasi Wisata Pulau Kumala terhadap Pendapatan Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik Snowball Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan pada masing-masing variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari B. Miles dan A. Huberman yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan yang dilakukan Dinas Pariwisata terhadap objek wisata Pulau Kumala telah dilakukan dari Tahun 2017-2019 dengan tujuan destinasi wisata Pulau Kumala mampu membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan melakukan inovasi dalam manajemen yang mengikuti kemajuan teknologi, sehingga mempermudah kinerja pegawainya dan pemanfaatan lahan yang mampu menunjang fasilitas dan kualitas Pulau Kumala.

Kata Kunci : *Problematika, Manajemen Keuangan, Destinasi Wisata.*

Pendahuluan

Pulau Kalimantan merupakan sebuah Pulau di Indonesia yang belum banyak dijelajahi oleh wisatawan namun memiliki banyak keunikan dan daya tarik termasuk juga kaya dengan warisan budaya dan terkenal dengan hutan tropis serta memiliki sumber daya alam yang terbanyak di Indonesia. Pulau Kalimantan memiliki destinasi wisata yang tidak terhitung jumlahnya yang menarik untuk dijadikan objek wisata favorit baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Novaljpd@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pulau Kumala merupakan daerah delta yang menyerupai pulau kecil ditengah Sungai Mahakam. Pulau kecil ini memanjang kesebelah barat Kota Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Tahun 2000, daratan seluas 76 hektare ini dirancang Pemerintah Daerah setempat untuk menjadi sebuah taman wisata rekreasi yang arsitekturnya merupakan perpaduan antara teknologi modern dan budaya tradisional. Seiring waktu secara bertahap dengan penambahan fasilitas-fasilitas rekreasi dan wahana-wahana yang selalu di perbaharui agar selalu menjadi daya tarik tersendiri dalam meningkatkan minat pengunjung.

Pada Tahun 2005 kemerosotan pengunjung mulai terlihat. Ada 2 faktor penyebab turunnya pengunjung Pulau Kumala yakni pertama akses menuju Pulau Kumala masih hanya bisa dilalui dengan jalur air dan konten yang ada di Pulau Kumala dapat di temukan pada daerah-daerah lainnya, sehingga menyebabkan APBD untuk menjalankan Pulau Kumala sebagai obyek wisata tidak seimbang dengan pendapatannya, mulai dari listrik, karyawan, dan perlengkapan di dalamnya. Pulihnya kembali Pulau Kumala pada Tahun 2015 dengan di keluarkannya kebijakan dari Bupati Kutai Kartanegara H.Rita Widyasari membangun jembatan Repo-Repo. Dengan kebijakan tersebut, keadaan pengunjung Pulau Kumala berangsur-angsur membaik dan jembatan tersebut menjadi magnet penarik para pengunjung dan pada Tahun 2017 Pulau Kumala mendapat juara 2 sebagai tempat wisata terpopuler. Dengan prestasi tersebut membuat wisatawan semakin banyak mengunjungi Pulau Kumala.

Dengan meningkatkannya pengunjung Pulau Kumala, menjadi penyebab munculnya problematika baru bagi Pemerintah Kutai Kartanegara. Sebagai contoh, muncul oknum-oknum calo tiket yang menawarkan harga tiket masuk sebesar Rp.30.000 secara paksa dan memaki pengunjung jika menolak tiket yang di tawarkan. Bisa disimpulkan bahwa keuntungan Pemerintah Daerah dalam mengelola wilayahnya dari sektor pariwisata terutama lokasi destinasi Pulau Kumala harus dikelola dengan baik dan benar. Ini menjadi tugas Pemerintah Daerah atau Dinas terkait dalam menjaga keamanan destinasi wisata di daerah Kutai Kartanegara agar tempat wisata tidak mengalami kerugian dan terbengkalai begitu saja.

Meningkatnya jumlah penduduk dalam beberapa tahun terakhir membuat penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang pengelolaan keuangan pariwisata. Penulis melihat bahwa sektor pengelolaan pariwisata merupakan salah satu sektor yang membantu suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Maka diperlukan pengelolaan keuangan yang benar agar hasil yang didapat dari sektor pariwisata membantu daerah tersebut.

Adapun beberapa penulis terdahulu yang berkaitan dengan pariwisata ialah :

1. Menurut Widyasmi (2012) dalam penulisannya tentang Strategi Pengelolaan Pariwisata Bahari di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, dimana penulis berfokus kepada strategi pengelolaan pariwisata dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*);

2. Novia R (2013) dalam penulisannya tentang Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana fokus dari penulisan ini Apakah Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada

Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2007 sampai Tahun 2012 serta mengetahui seberapa efektif dan efisiennya pengelolaan pariwisata dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sementara itu fokus penulisan yang dibuat oleh penulis adalah manajemen keuangan di sektor destinasi wisata, yang dimana manajemen keuangan belum pernah diteliti sebelumnya. Menurut penulis manajemen keuangan dapat menentukan kelangsungan daerah dengan pemanfaatan sektor pariwisata sebagai sarana penarik wisatawan. Sehingga meningkatkan pengunjung daerah dapat menjadi salah satu indikator dalam pembangunan daerah.

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti adalah Bagaimana Manajemen Keuangan Destinasi Wisata Pulau Kumala di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagaimana Kontribusi Destinasi Wisata Pulau Kumala terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Dasar Teori

Pariwisata

Definisi Pariwisata

Menurut Koen Meyes (2009:159) Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, mempernaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain. Menurut Suwanto (1997:3) Pariwisata adalah suatu proses berpergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingannya, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti hanya sekedar ingin tahu, menambah pengalaman atau belajar.

Bisa disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang tidak menetap untuk mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu dan lain-lain. Dengan melakukan perjalanan Pariwisata, dapat memberikan kepuasan hati dan mencari ilmu serta menambah pengalaman perjalanan yang mana kegiatan pariwisata itu sendiri menjadi daya tarik tersendiri suatu wilayah.

Manfaat Kepariwisataan

Pariwisata merupakan pemanfaatan tempat agar dapat dijadikan kegiatan yang secara langsung maupun tidak menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga terdapat timbal balik antara masyarakat dan pariwisata. Menurut Yoety (2008:62) menegaskan dari sudut pandang politisi pariwisata memberikan dampak yang positif dapat berfungsi sebagai katalisator dalam pembangunan. Bahkan banyak negara yang bergantung dari industri pariwisata sebagai sumber pajak dan pendapatan. Dengan menggunakan peningkatan pengunjung untuk mempengaruhi angka pendapatan daerah dan juga menarik investor perusahaan swasta agar bekerjasama membantu bergerak mempromosikan dan menjual jasa kepada wisatawan. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat. Manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial dan budaya.

Tujuan Pariwisata

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di

sebutkan pada pasal 4 bahwa tujuan kepariwisataan adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Menghapus kemiskinan;
4. Mengatasi pengangguran;
5. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
6. Memajukan kebudayaan;
7. Mengangkat citra bangsa;
8. Memupuk rasa cinta tanah air;
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa;
10. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Sesuai dengan peraturan di atas, pariwisata sendiri mempunyai tujuan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, banyak keuntungan yang negara ataupun daerah dapat dari tujuan pelaksanaan kepariwisataan ini. Dengan berdasarkan kesejahteraan masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan serta memperkuat nasionalisme untuk mencintai tanah air, serta membangun hubungan internasional

Prinsip Pariwisata

Menurut I Gede Pitana (2009:81), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan;
2. Preverensi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata;
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal;
4. Pelayanan kepada wisatawan berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal;
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi jika sebaiknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas.

Manajemen Keuangan

Pengertian Manajemen Keuangan

Kamaludin dan Indriani (2012:1) berpendapat bahwa manajemen keuangan adalah upaya untuk mendapatkan dana dengan cara paling menguntungkan serta mengalokasikan dana secara efisien dalam perusahaan sebagai sarana untuk mencapai sasaran bagi kekayaan pemegang saham.. kemudian menurut Sutrisno (2003:3) pengertian manajemen keuangan adalah semua kegiatan perusahaan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk memakai dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.

Menurut beberapa teori diatas bisa kita pahami bahwa manajemen keuangan merupakan usaha dalam mengumpulkan, mengalokasikan dana secara

baik dan benar sehingga tercapainya tujuan organisasi atau lembaga pemerintahan serta mencari sumber dana dari berbagai macam investor yang dapat bekerjasama dengan mencapai kesepakatan.

Fungsi Manajemen Keuangan

Menurut Agus Harjito, Martono (2008:4) mengemukakan bahwa ada 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan :

1. Keputusan Investasi;
2. Keputusan Pendanaan;
3. Keputusan Pengelolaan Aset;

Prinsip Manajemen Keuangan

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata di sebutkan bahwa prinsip pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Publik Pemerintah Pusat telah memberikan dasar yang kuat agar Pemerintah Daerah dapat leluasa mengatur dan mengelola dana dari sektor pariwisata sehingga dapat menjaga stabilitas pendanaan agar tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Dalam manajemen keuangan diperlukan dasar atau kaidah yang dapat dijadikan acuan dalam memimpin sebuah kerjasama, ada beberapa hal dasar yang perlu di terapkan dalam memimpin manajemen yaitu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sifar disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, utamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan sendiri, upah yang adil, pemusatan, hirarki, tata tertib, keadilan, stabilitas kondisi karyawan, inisiatif, dan semangat kesatuan.

Unsur Manajemen

Unsur Manajemen dalam pelaksanaannya saling berkaitan erat satu sama lainnya. Masing-masing dari faktor hal yang demikian tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya salah satu karena pengaplikasian fungsi manajemen dalam perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan bagus. Komponen unsur-unsur manajemen biasanya meliputi rumusan dengan 6 M yaitu :

1. *Men*, tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif;
2. *Money*, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. *Methods*, metode adalah cara-cara yang dipergunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan;
4. *Materials*, bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
5. *Machines*, mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan/dipergunakan untuk mencapai tujuan;
6. *Market*, pasar untuk menjual output dan jasa-jasa yang dihasilkan.

Unsur-unsur yang ada ini ialah syarat agar bisa jalannya suatu manajemen dengan kurangnya suatu syarat maka kesuksesan dalam manajemen belum bisa tercapai dengan maksimal, sehingga menurut penulis enam unsur ini adalah yang paling relevan untuk mencapai tujuan dalam manajemen.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mana menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi

tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Sukmadinata (2006:72) yang menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *Snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah sebagai teknik penentuan sample yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sample semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis dilakukan setelah melakukan seminar proposal .

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik penelitian antara lain, pengamatan (*observasi*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Manajemen Keuangan Destinasi Wisata Pulau Kumala Kabupaten Kutai Kartanegara

Pulau Kumala telah membantu Pendapatan Asli Daerah dari bidang destinasi wisata, yang mana keseluruhan hasil dari retribusi pajak dan lain-lain diberikan kepada daerah dan digunakan untuk melakukan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan observasi dan data yang penulis dapatkan, maka penulis mencoba untuk menjelaskan Problematika Manajemen Keuangan Destinasi Wisata Pulau Kumala Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini penulis akan memfokuskan mengenai :

a. Perencanaan

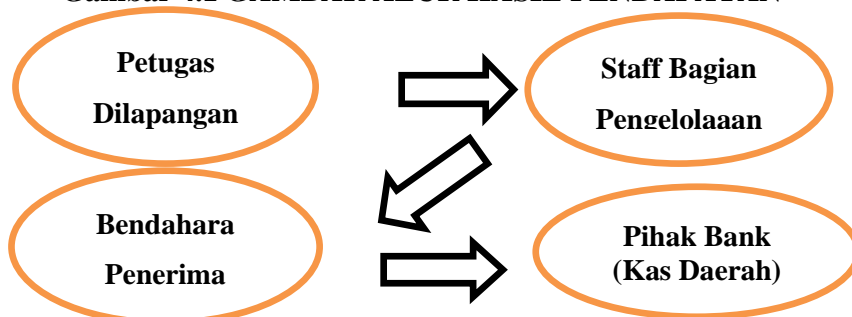
Pentingnya perencanaan dikarenakan didalam langkah awal untuk mendapatkan tujuan, suatu dinas/ perusahaan harus mempunyai gambaran yang telah disusun untuk kedepannya terutama dibidang manajemen keuangan. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan yang fatal, serta membangun sinergitas dengan pihak lain yang mampu membantu membangun tujuan bersama.

Oleh karena itu perlu dilakukan inovasi baru yang dapat membantu meningkatkan manajemen keuangan. Mengenai hal tersebut penulis mewawancarai Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata. Pak Ridha mengungkapkan bahwa “dalam perencanaan manajemen keuangan sektor pariwisata penerapan yang kita lakukan ialah semua hasil pendapatan dari Destinasi Pulau Kumala kita data dan kemudian setelah data kita catat, kemudian seluruh pemasukan hasil dari karcis masuk, uang parkir serta uang dari sewa lahan disana di serahkan kepada Dinas Pariwisata melalui bagian seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata yang mana data dan pemasukan dari lapangan di serahkan dan diperiksa kembali oleh staff disana. Setelah data sudah dicek, kemudian diserahkan ke bagian bendahara penerimaan dibawah Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan untuk disetorkan kepada pihak Bank”.

Hal diatas diperkuat dengan yang diungkapkan Staff Seksi

Pengelolaan Daya Tarik Wisata yaitu “ dalam bidang ini kami menjadi perpanjangan tangan dari anggota kami yang dilapangan dan sudah menjadi tugas kami untuk melakukan pengecekan ulang dan penghitungan kembali. Sehingga semua pendapatan yang telah disetorkan ke kami bisa lebih akurat dan jelas. Dengan demikian, jika sudah ditangan bendahara penerima bisa langsung disetorkan kepada pihak bank untuk segera dimasukkan ke kas daerah. Selain sebagai perpanjangan dan pengecekan, kami juga ditugaskan untuk mencari informasi-informasi dari investor swasta yang mau bekerja sama”.

Gambar 4.1 GAMBAR ALUR HASIL PENDAPATAN



Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Sesuai penjelasan gambar diatas, Dinas Pariwisata telah merencanakan penerapan alur penarikan retribusi dari setiap destinasi wisata di Kutai Kartanegara. Selain dengan perencanaan sistem manajemen keuangannya, Dinas Pariwisata juga merencanakan program *Smart Island Kumala* yang mana program ini meliputi *smart parking*, *smart ticketing*, *smart connection* yang bertujuan untuk mempermudah manajemen pemasukan dari Pulau Kumala.

b. Pengambilan Putusan

Dinas Pariwisata membuka lahan inventasi dengan para investor dengan tujuan sektor pariwisata dapat menjadi wadah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah yang mana harus menarik investor swasta dan masyarakat. Sehingga dengan dibuka kembali Pulau Kumala agar membantu peningkatan Pendapatan Daerah dan tujuan Pemerintah memutuskan untuk membuka lahan agar menambah variasi dan keragaman dalam hal wahana maupun penyedia jasa, souvenir dan lain-lain.

Penulis mewawancarai Kepala Bidang Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Ibu Hetty egungkapkan bahwa “ dalam membantu meningkatkan Pendapatan Pulau Kumala, Dinas Pariwisata menawarkan kerjasama dengan para investor swasta dengan menyewakan tanah untuk usaha mereka. Jadi para investor diharuskan membayar sewa tanah kepada Dinas Pariwisata agar para investor swasta dan masyarakat sekitar dapat membuka lahan penyedia jasa, souvenir dan pangan yang dapat diperjual belikan kepada konsumen mereka yang sedang berwisata di Pulau Kumala”.

Hal ini juga disampaikan oleh Staff Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan bagian Bendahara Penerima “ dengan menggunakan jasa sewa tanah, Dinas Pariwisata dapat menambahkan wahana-wahana baru dan meningkatkan fasilitas seperti adanya penjual souvenir jika berkunjung ke destinasi wisata Pulau Kumala. Serta penjual jajanan yang dapat dibeli disana oleh para wisatawan. Sehingga para wisatawan tidak perlu menghabiskan waktu di jalan untuk membeli perbekalan”.

Tabel 4.2 DAFTAR NAMA INVESTOR SWASTA

NO	NAMA INVESTOR SWASTA	JASA YANG DISEWAKAN
1.	Hanna Seraung Souvenir	Menjual Beraneka ragam Souvenir
2.	Ninebotmini Tenggara	Menyewakan Ninebot
3.	Ali	Penyewaan Motor Listrik

Sumber : Diolah Oleh Penulis 2020

Dengan pemaparan dan tabel diatas bisa penulis simpulkan, bahwa Dinas Pariwisata bisa membuat keputusan dalam manajemen keuangan destinasi wisata Pulau Kumala dengan memanfaatkan investasi dari pengusaha swasta untuk membantu meningkatkan pendapatan dari destinasi wisata Pulau Kumala. Dengan adanya kerjasama akan memberikan banyak manfaat pada peningkatan pemasukan dari sektor Pariwisata.

c. Pembimbingan

Staff Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan menyatakan, “ dalam sebagian staff subbagian Penyusunan Program dan Keuangan hampir keseluruhan dari staff merupakan orang-orang yang telah mengenyam pendidikan yang sesuai dengan bidangnya, hanya perlu memberikan sedikit pengarahan dan beberapa tugas pokok dari setiap staff pegawai bagian subbagian Penyusunan Program dan Keuangan”.

Dari penyampaian diatas, penulis menyimpulkan bahwa didalam bidang Penyusunan Program dan Keuangan, Kepala Bidang telah menempatkan orang-orang yang telah mengambil pendidikan yang sesuai dengan bidang yang telah disediakan. Karena dalam manajemen keuangan sangat teliti dalam penghitungan dan kesesuaian data yang diterima dengan yang disampaikan.

Bapak Edi selaku Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian mengungkapkan bahwa, “kami melakukan perekrutan pegawai memerlukan beberapa kriteria khusus seperti yang berpengalaman dibidang ini. Jadi setelah melakukan perekrutan, kami tidak perlu terlalu banyak memberikan sosialisasi dan langsung dapat bekerja, sehingga ini akan lebih efisien dari pada kami merekrut yang tidak mempunyai dasar dalam bidang perekonomian”.

Menurut hasil wawancara diatas, Dinas Pariwisata menugaskan kepada pegawai yang menjabat diberikan mandat oleh petinggi untuk bisa

memberikan bimbingan, yang mana bimbingan yang diberikan merupakan suatu proses yang mengandung makna bahwa bimbingan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, bukan kegiatan seketika atau kebetulan. Dalam proses pelatihannya pun, pembimbing bisa menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap bidangnya dan setiap staff pegawai yang diterima bersedia untuk mampu mengikuti dan menyesuaikan dalam bekerja.

d. Pengkoordinasian

Pak Ridha selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata mengungkapkan, “ada beberapa bidang yang telah dibagi dibawah bidang saya, dan tugas pokok setiap bidang ini terdapat tugas masing-masing yang mana tujuan dari pembagian tugas ini agar dapat terkoordinir dengan semestinya. Jadi setiap seksi bidang ini telah ditunjuk Kepala Seksi yang mana bertanggung jawab dalam tugas bawahannya karena saya tidak bisa memantau langsung semua kinerja. Jadi kita memerlukan tangan kedua sebagai penanggung jawab dalam seksi bidangnya”.

Dari penyampaian di atas, Pak Ridha telah melakukan langkah pengkoordinasian dalam manajemen keuangan destinasi wisata di Kutai Kartanegara dengan memberikan wewenang kepada staff dibawahnya agar bisa mengatur seluruh staff dan pegawai yang ada di dalam kantor maupun di lapangan. Langkah pembagian tugas dan wewenang ini pun bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan dalam menjalankan fungsi setiap sub bidang. Jadi tahap koordinasi yang digunakan ini merupakan koordinasi secara langsung dilaporkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan

Penulis juga mewawancarai salah satu staff Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, Ibu Airin mengungkapkan bahwa, “pernah terjadi problem dalam penerimaan hasil dari pendapatan Pulau Kumala, yang mana hasil yang disetorkan tidak sesuai dengan yang diterima”.

Dari hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan informasi tentang problem pengkoordinasian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, yang mana problem ini bisa menjadi kerugian besar bagi daerah jika tidak langsung diselesaikan oleh Dinas Pariwisata. Dengan terjadinya problem seperti ini, Dinas Pariwisata segera memperbaiki dan tidak pernah terjadi lagi.

e. Pengendalian

Dalam pengendalian ini, diperlukan beberapa poin seperti pengawasan dan lain-lain. Penulis sudah mewawancarai Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Ibu Hetty mengungkapkan bahwa, “banyak destinasi wisata yang berada di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana beberapa destinasi berjarak cukup jauh dan di batasi dengan Kabupaten lain. Dulu pernah terjadi parkir liar yang memanfaatkan kelonggaran tak terkecuali Pulau Kumala”.

Dalam hasil wawancara diatas problematika juga terjadi di pengendalian yang mana akibat dari luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan memiliki banyak destinasi wisata selain Pulau Kumala, sehingga bisa dimanfaatkan oleh oknum parkir liar. Hal ini dapat menjadi kurangnya pemasukan bagi daerah, oleh karena itu untuk bisa menerapkan

pengendalian dan pengawasan secara maksimal, Dinas Pariwisata membuat perpanjangan tangan Dinas dengan memberikan tugas mengawasi di daerah yang mempunyai destinasi wisata di daerahnya dengan diawasi dan dibimbing langsung oleh petugas yang dipercayakan menjaga daerah tersebut.

Penulis juga mewawancarai Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Bapak Ridha menerangkan bahwa, “ kami juga bersinergi dengan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong untuk melakukan pengawasan di beberapa titik secara rutin. Hal ini pun dilakukan bagi keamanan dan kenyamanan pengunjung destinasi wisata”.

Dari hasil wawancara di atas, Dinas Pariwisata juga melakukan pengendalian secara eksternal. Dengan penerapan pengawasan dan pengendalian eksternal, Dinas Pariwisata telah bekerja sama dengan kepolisian dan satpol PP agar bisa bertugas meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung serta mengamankan area retribusi pariwisata untuk menghindari adanya tindakan ilegal dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

f. Penyempurnaan

Penyempurnaan adalah segenap aktivitas memperbaiki kekurangan dan ketidaktepatan yang timbul pada struktur organisasi dan taat kerja sewaktu berlangsungnya proses penyelenggaraan usaha kerjasama tim atau dengan kata lain improvisasi.

Bapak Ridha mengungkapkan bahwa, “ dalam manajemen keuangan kami berupaya bisa memaksimalkan kepada evaluasi kinerja dan tindakan pengawasan yang lebih kami tekankan, karena dalam bidang manajemen keuangan ini kami telah menerapkan seperti peraturan yang telah ditentukan bagaimana alur dan sebagainya. Oleh karena itu dengan melakukan evaluasi, kami bisa terus memperbaiki kekurangan yang ada”.

Dengan beberapa keterangan di atas, penulis menyatakan bahwa manajemen keuangan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan evaluasi dalam waktu yang tidak ditentukan. Tujuan dari evaluasi ini ialah pemeriksaan kembali hasil retribusi dan bagaimana jalannya pelaksanaan di lapangan. Manfaat dari evaluasi ini juga bisa menjadi bahan perbandingan agar segala kekurangan yang terjadi di tahun sebelumnya dapat diantisipasi oleh Dinas Pariwisata untuk kedepannya.

Kontribusi Pulau Kumala

Dalam memajemen keuangan sektor pariwisata, diharapkan untuk memberikan kontribusi yang akan didapatkan daerah yang mengelolannya. Hasil dari kontribusi yang diberikan digunakan untuk membantu pembangunan dan peningkatan fasilitas di daerah tersebut. Destinasi Pulau Kumala pun demikian, jalannya manajemen keuangan destinasi wisata Pulau Kumala diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang membantu dalam peningkatan pendapatan daerah maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Bapak Ridha mengungkapkan bahwa, “Pulau Kumala memberikan kontribusi kepada

Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih 20% dari Pendapatan Asli Daerah Kutai Kartanegara. Oleh karena itu Destinasi Wisata Pulau Kumala sangat membantu dalam peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Gambar 4.3
Jumlah Pendapatan Dari Sektor
Destinasi Wisata Tahun 2019

NO	NAMA TEMPAT	PENDAPATAN		
		2017	2018	2019
1.	PULAU KUMALA	Rp2,533,371,000.00	Rp1,856,964,800.00	Rp1,312,968,000.00
2.	PLANETARIUM	Rp105,328,000.00	Rp135,876,000.00	Rp46,816,000.00
3.	PANTAI MERAH SAMBOJA	Rp305,432,000.00	Rp372,746,000.00	Rp276,640,000.00
4.	WADUK PANJI	Rp152,271,000.00	Rp204,321,000.00	Rp133,884,000.00

Sumber : Diolah Oleh Dinas Pariwisata 2020

Dengan pernyataan dan tabel di atas, yang mana bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen keuangan destinasi wisata Pulau Kumala mampu mempengaruhi peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pulau Kumala mampu memberikan 40% dari seluruh destinasi wisata lainnya. Jika dikelola dengan benar dan mengedepankan manajemen yang efektif dan efisien, maka Pulau Kumala mampu pulih dari mati surinya dulu dan dengan adanya penerapan dalam perencanaan dan pengawasan yang baik, Dinas Pariwisata bisa menjaga Destinasi Wisata Pulau Kumala dari adanya penyelewengn yang tidak diinginkan, maka destinasi Pulau Kumala bisa membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Perencanaan dikarenakan dalam langkah awal untuk mendapatkan tujuan suatu dinas/perusahaan harus mempunyai gambaran yang telah disusun untuk kedepannya terutama di bidang manajemen keuanagn. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah merencanakan beberapa langkah baru dalam mempermudah pendataan dengan memberlakukan program *Smart Island Kumala*, yang mana program ini merupakan rencana kedepan, inovasi baru dari Dinas Pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan mempermudah sistem yang bekerja disana dalam melaksanakan tugasnya.

Dari Dinas Pariwisata telah melakukan penyewaan lahan sebagai upaya meningkatkan pendapatan dari sektor Destinasi Wisata Pulau Kumala, kemudian meningkatkan pendapatan dari sektor Destinasi Wisata Pulau Kumala dengan cara menyewakan lahan untuk para investor swasta yang mau bekerjasama untuk

meramaikan Pulau Kumala tersebut, mulai dari pusat kuliner dan penjualan souvenir yang diperjual belikan kepada pengunjung dan para investor membuat kerja kontrak yang mana disetujui oleh kedua belah pihak.

Dinas Pariwisata memberikan kriteria khusus dalam beberapa bidang, karena manajemen keuangan merupakan kebutuhan yang harus ditangani oleh orang yang mempunyai dasar di bidangnya. Maka Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan telah memberikan syarat, yang mana para staff harus mempunyai dasar ilmu manajemen.

Dinas Pariwisata telah melakukan pembagian tugas-tugas pokok kepada para pegawainya, namun pernah terjadi kesalahan dalam data pendapatan yang dilaporkan dengan data yang diterima oleh Dinas Pariwisata. Problem ini bisa menjadi masalah besar apabila terjadi secara terus menerus. Perbedaan data di lapangan dengan yang diterima segera diperbaiki kemabli dengan bagian pengawasan destinasi wisata, sehingga ini menjadi problem Dinas Pariwisata dalam mengkoordinir seluruh staff di lapangan maupun kantor.

Dalam pengendalian atau pengawasan, Dinas Priwisata telah melakukan tindakan pengendalian di lapangan. Namun karena banyaknya destinasi wisata di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pariwisata mengalami kesusahandalam melakukan pengawasan langsung karena kurangnya relasi dengan warga sekitar. Sehingga kasus parkir liar yang memanfaatkan celah tersebut tentu menjadi problem dalam pengendalian daerah yang mempunyai destinasi wisata. Dinas Pariwisata meminta bantuan dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong dalam menertibkan parkir liar tersebut.

Bagian keuangan telah melakukan manajemen keuangan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, serta melakukan evaluasi yang mana tujuan dari evaluasi ini untuk mengetahui dan memberikan solusi untuk kedepannya. Oleh karena itu, dalam bidang manajemen keuangan berupaya bekerja untuk mengetahui apa yag masih diperlukan dalam membangun destinasi wisata Pulau Kumala.

Pulau Kumala merupakan penyumbang pendapatan daerah secara total 20% dari pendapatan daerah. Saat ini Dinas Pariwisata masih berusaha untuk terus berinovasi dan memanajemen keuangan dibidang pariwisata agar mampu meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, maka penulis meminta izin untuk memberikan beberapa masukan ataupun saran-saran, antara lain perlu melakukan studi banding dengan beebraapa daerah wisata yang mempunyai destinasi wisata, sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam menerapkan pengendalian di daerah destinasa wisata dan perlu melakukan perbaikan dibagian pengkoordinasian antara petigas lapangan dan Dinas Pariwisata dengan cara salah satu pegawai Dinas Pariwisata yang ditempatkan di Pulau Kumala untuk membantu pendataan yang lebih akurat untuk menghindari terjadinya kesalahan komunikasi yang terkadang terjadi kesalahan penghitungan pengunjung.

Daftar Pustaka

Buku

Agus Harjito, Martono. 2008. *Manajemen Keuangan*, edisi 1. Yogyakarta: EKONISIA

- Kamaludin, dan rini Indriani. 2012. *Manajemen keuangan*. Edisi Revisi. CV. Bandar Maju. Bandung.
- Meyers Koen. 2009. *Pengertian Pariwisata*, Jakarta. Unesco Office.
- Pitana I. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Sugiyono . 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Graha Aksara
- Sutrisno. 2003. *Manajemen Keuangan* (Teori, Konsep, dan Aplikasi). Edisi Pertama. Cetakan Kedua. EKONISIA. Yogtakarta.
- Suwantoro Gamal. 1997. *Dasar - dasar Pariwisata*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Yoeti Oka A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta. Pradaya Pratama.

Jurnal

- Widyasmi Kartika. 2012. *Strategi Pengelolaan Pariwisata Bahari Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dokumen

- Undang – Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang *Kepariwisataan*